

Warisan Feodalisme Dalam Pendidikan

Syofian Iddian

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ibnu Sina Batam

Syofian.iddian@gmail.com

Abstrak

Pendidikan di Indonesia merupakan warisan dari pendidikan masa kolonial Belanda dan Jepang, di mana pada masa itu kekerasan fisik merupakan hal yang lumrah terjadi sehingga perbuatan itu juga masuk kedalam ranah pendidikan. Sudah lebih dari tujuh puluh tujuh tahun Indonesia merdeka namun warisan kekerasan verbal maupun non verbal juga umum terjadi dalam dunia pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan fakta apa adanya di lapangan. Bentuk perbuatan feodalisme yang umum terjadi dalam pendidikan pada umumnya berbentuk: pertama. Sikap kritis siswa dianggap sebagai pembangkangn, kedua. Peraturan yang dibuat disekolah hanya berlaku untuk siswa saja, ketiga. Hasil belajar siswa diukur dari nilai rapor. Keempat. Masih ada istilah sekolah favorit yang dapat mengkotakkan status sosial siswa. Feodalime pendidikan ini akan dapat dihapus dengan beberapa cara diantaranya, merubah mindset pendidik, terapkan konsep merdeka belajar, hapus ujian nasional, terapkan system zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB)

Kata kunci: Feodalisme Pendidikan

Abstract

Education in Indonesia is a legacy of education during the Dutch and Japanese colonial times, where at that time physical violence was commonplace, so this act was also included in the realm of education. It has been more than seventy-seven years since Indonesia's independence, but the legacy of verbal and non-verbal violence is also common in the world of education. This study uses a qualitative descriptive research method that describes the facts as they are in the field. The forms of feudalism that commonly occur in education are generally in the form of: first. Students' critical attitude is considered as disobedience, second. The rules made at school only apply to students, third. Student learning outcomes are measured by report cards. Fourth. There is still a term favorite school that can compartmentalize the social status of students. This educational feudalism can be removed in several ways, including changing the mindset of educators, applying the concept of independent learning, abolishing national exams, implementing a zoning system for new student admissions (PPDB).

Keywords: Educational Feudalism

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Membahas persoalan Pendidikan tidak akan pernah habisnya, ini disebabkan pendidikan merupakan kebutuhan primer bagi manusia selama manusia ini masih ada maka pendidikan akan selalu hadir untuk memenuhi kebutuhan. Sebagai tolak ukur kemajuan

suatu bangsa adalah pendidikan, suatu Negara kita katakan maju dapat dipastikan penyebabnya adalah pendidikan yang berkualitas telah terlaksana di Negara tersebut, sebaliknya Negara yang belum maju maka juga dapat dipastikan pelaksanaan pendidikan belum terlaksana dengan baik di Negara itu.

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia merupakan warisan dari pendidikan Negara kolonial Belanda dan Jepang, hal ini dapat terlihat dari warisan feodalisme yang masih tetap berlangsung dalam proses pendidikan di Indonesia mulai dari pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi.

Pendidikan yang terjadi pada pendidikan mapan atau sekolah formal pada saat ini justru berlangsung pendidikan yang menjauhkan siswa dari realitas dunianya. Membentuk siswa siswa yang individualistik. Pendidikan mapan seringkali hanya memperlakukan siswa sebagai bejana kosong yang siap diisi atau bisa disebut pendidikan *gaya* pendidikan *gaya bank*. (Freire, Paulo: 1999).

Yaitu sistem pendidikan yang memperlakukan anak didik sebagai obyek investasi dan sumber deposito potensial, sedangkan investornya adalah guru, sementara depositonya adalah ilmu pengetahuan. Sehingga disini relasi yang terjadi antara guru dan murid adalah relasi subjek-objek, guru sebagai subjek aktif pusat dari segalanya, sedangkan murid sebatas objek pasif yang siap menerima perintah dan dikte dari sang guru. Seperti kata pepatah yang berkembang "*guru = digugu lan ditiru*", dimana dari hal tersebut menjelaskan bahwa sifat feodalistik masih kental dalam dunia pendidikan, guru dan murid jelas terpisahkan oleh hierarki dan tidak memiliki posisi tawar yang sama.

Pendidikan yang mengekang justru mendorong lahirnya sikap membeo dikalangan murid. Sebatas pengalihan informasi bukan pemahaman dan pemaknaan yang siswa dapatkan. Untuk itu mendorong pemikiran kritis siswa dengan membiarkannya berargumentasi apapun itu menjadi hal yang penting bukan hal yang justru malah dihindari guru, karena seringkali guru menganggap pemikiran kritis siswa sebagai sikap pembangkangan. Guru menghargai argumen siswa lalu memberikan arahan, bukan malah tersinggung lalu memarahi siswa tersebut, terlebih memberikan hukuman yang tidak substansial. (Rahmawati 2022)

Perilaku feodalisme tidak hanya berlaku dalam pendidikan dasar dan menengah saja tetapi feodalisme juga menggejala dan hidup dalam dunia pendidikan tinggi. Simaklah perilaku akademisi kita. Bila telah menyandang gelar akademik seabrek seolah-olah orang yang gelarnya lebih rendah darinya tak sepadan. Apalagi mengakui pemikirannya. Ironisnya lagi, mereka itu memiliki ego tinggi dan cara pandang kaca mata kuda.

Penyakit feodalisme juga merasuki kaum terdidik yang memaksakan metodologi pemikirannya dalam riset. Ini tak sekadar feodal tapi sekaligus hegemoni. Tak ada kemandirian dan kebebasan berdialektika pemikiran. Lainnya, jika ada buku yang ditulis tanpa gelar seabrek seolah-olah tak absah. Apakah mereka tak merasa malu bila membaca buku karya pemenang Nobel. Mereka tak pernah memamerkan gelarnya. Ambil contoh, Amartya Sen, Joseph E. Stiglitz, Elinor Ostrom, dan Paul Krugman, semuanya pemenang Nobel Ekonomi. Mereka menulis buku nyaris tanpa mencantumkan gelar akademiknya. Padahal jelas mereka itu Guru Besar di Universitas top dunia. Mengapa akademisi negeri ini tak mencontoh mereka? Apakah kita masih mengidap sikap feodalisme dan kolonialisme ala Belanda yang sudah usang?

Belanda saja sudah meninggalkan sikap begitu. Ini yang kerap kali disebut mentalitas bangsa terjajah. (Karim 2022)

Dalam makalah ini penulis akan membahas bentuk-bentuk pelaksanaan feodalisme serta cara mengatasi feodalisme dalam pendidikan

A. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu luas, penulis perlu membatasi pembahasan dalam makalah ini. Pembatasan yang penulis terapkan yaitu hanya membahas Bentuk Feodalisme dalam pendidikan, dan Upaya Mengatasi Feodalisme dalam pendidikan

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis terapkan yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan feodalisme Pendidikan?
2. Apa saja bentuk-bentuk feodalisme dalam pendidikan?
3. Bagaimana cara mengatasi feodalisme dalam pendidikan?

C. Tujuan

Makalah ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para pembaca dalam hal perilaku feodalisme dalam pendidikan. Karena feodalisme dapat merusak subjek dan objek pendidikan

D. Manfaat

Makalah ini memberikan manfaat yaitu sebagai referensi bagi para pembaca tentang kajian feodalisme pendidikan

PEMBAHASAN

A. Pengertian feodalisme pendidikan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa feodalisme adalah sistem sosial yang mengagung-agungkan jabatan atau pangkat dan bukan mengagung-agungkan prestasi kerja. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:2016). Dalam pengertian lain juga diartikan bahwa feodalisme adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan kalangan bangsawan atau monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerjasama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Dalam pengertian yang asli, struktur ini disematkan oleh sejarawan pada sistem politik di Eropa pada abad pertengahan, yang menempatkan kalangan kesatria dan kelas bangsawan lainnya (*vassal*) sebagai penguasa kawasan atau hak tertentu (disebut *feif* atau dalam bahasa latin, *feodum*) yang ditunjuk oleh monarki (biasanya raja atau *lord*). (Salmi 2021)

Menurut Sigit Djamiko dalam bukunya Filsafat Sosial (dari Feodalisme Hingga Pasar Bebas) istilah “Feodalisme” diambil dari istilah latin “feodom” yang berarti fief. Jadi istilah feodalisme secara harfiah berarti suatu masyarakat yang diatur berdasarkan sistem fief, dengan kekuatan legal dan politis yang menyebar luas diantara orang-orang yang memiliki kekuasaan

ekonomi. Di dalam buku ini juga, dijelaskan bahwa feodalisme itu berarti kaum bangsawan menduduki posisi kepemilikan yang efektif atas lahan.

Dari beberapa pengertian feodalisme di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa feodalisme adalah suatu kekuasaan yang dimiliki suatu kaum atau kelompok atas masyarakat yang mana kekuasaannya memberikannya hak istimewa.

Pengertian pendidikan yang dijelaskan dalam Undang-Undang sisdiknas tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. (Undang-undang RI no 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS 2008)

Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan Nasional Indonesia mengatakan pendidikan tersebut adalah merupakan tuntutan didalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. (Haryanto 2012)

Dari kedua definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa feodalisme pendidikan adalah suatu paham yang tumbuh dan berkembang dalam dunia pendidikan dimana pendidik memiliki kekuasaan yang absolut sebagai eksekutor dalam pendidikan, sedangkan peserta didik merupakan orang yang sepenuhnya berada dalam komando pendidik, atau senioritas selalu benar dan junior selalu siap untuk salah.

B. Bentuk-bentuk feodalisme dalam pendidikan

Fenomena feudalism telah jamak berlangsung hingga kini di negara-negara yang dulunya mengalami penjajahan. Efek penerapan ajaran feodalisme yang ditumbuhkan-kembangkan kaum penjajah sejak dulu itu saking dahsyatnya masih tetap membekas dan bahkan meninggalkan perilaku buruk di kalangan masyarakat Indonesia. Dulu Bung Karno amat benci dengan ajaran dan kebiasaan feodalisme yang menempatkan sebagian manusia lebih penting dan tinggi harkat dirinya dibanding sebagian yang lain.

Padahal dalam revolusi kemerdekaan Bung Karno selalu menaruh perhatian pada kaum papa (marhaen) yang tertinggal dan terdzholimi oleh sepak terjang kaum elite baik sebagai korban penjajahan maupun akibat system feodalisme yang masih melekat di sebagian manusia Indonesia. Feodalisme itu sampai saat ini masih berada diberbagai sektor kehidupan manusia Indonesia tak terkecuali di sektor pendidikan sehingga dikenal dengan feodalisme pendidikan.

Feodalisme pendidikan dengan kasat mata tampak dan kita alami dalam penyelenggaraan pendidikan meski alibi yang digunakan terkesan menarik dan menyilapkan pemahaman. Sekolah unggulan, sekolah favorit, pendidikan eksklusif dan diskriminasi perlakuan dalam memperoleh pendidikan bermutu bagi semua komponen bangsa mewujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di republik ini.

Masih banyak lagi fenomena feodalisme pendidikan dalam keseharian. Hubungan antara guru murid dan dosen mahasiswa, bahkan antar mahasiswa itu sendiri tak dapat dipungkiri juga telah menjelma menjadi suatu kebiasaan yang tanpa disadari malah

menyuburkan perilaku feodalisme dalam pendidikan. Dosen yang menempatkan dirinya sebagai satu-satunya sumber ilmu dan merasa paling benar berpotensi untuk berperilaku feodal. Konsep pendidikan yang modern yang semestinya menempatkan anak didik sebagai subyek dan bukan obyek diganti menjadi “teacher centered” atau pengajar yang seolah-olah paling tahu segala-galanya. Jarak dan konsep “aku dan kau berbeda” karena aku adalah guru sedangkan engkau adalah murid, sehingga engkau (murid) mesti ikut apa kataku, merupakan prinsip-prinsip yang kerap kali kita saksikan dan alami di dunia pendidikan. Profesor, guru dan dosen tidak sedikit yang menunjukkan keangkuhan akademik (arogan) terhadap anak didiknya dan mereka yang dianggap berstatus rendah. (Musnandar 2021)

Keangkuhan akademik menjadi sangat mengganggu bagi anak didik (siswa dan mahasiswa) yang ingin berkreasi dalam menciptakan hal-hal diluar pakem dan kebiasaan. Pemikiran dan kegiatan “*out the box*” yang merupakan bagian dari penajaman daya kreativitas memang amat menafikan kebiasaan-kebiasaan akademik karena akademik senantiasa menuntut alur linearitas sedangkan kreativitas tumbuh dalam tatanan lateralitas.

Untuk lebih jelas maka penulis akan menguraikan benetuk-bentuk feodalisme dalam dunia pendidikan.

1. Pemikiran kritis siswa dianggap sebagai sikap pembangkangan.

Keterampilan abad 21 yang dirancang dalam kurikulum dua ribu tigabelas (K13) dikenal dengan empat keterampilan siswa yang harus dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran. Empat keterampilan tersebut disingkat dengan 4C, (*Critical Thinking and Problem Solving, Creativity and Innovation, Communication, dan Collaboration*) (Permana 2021). Dari keempat keterampilan itu salah satunya siswa diajar untuk berpikir kritis, menganalisis persoalan dengan cermat tidak menerima begitu saja informasi, dari tuntutan kurikulum tersebut akan menjadikan siswa sering berbeda pandangan dengan gurunya. Guru yang feodalisme akan menganggap pembangkangan jika siswa menolak pendapatnya.

2. Aturan hanya untuk siswa bukan untuk guru

Ada satu ungkapan dari pendidik bahwa “*guru bukan siswa, jika siswa ingin seperti guru maka siswa harus menjadi guru terlebih dahulu*”. Maksud dari ungkapan itu adalah bahwa guru boleh melanggar aturan yang berlaku disekolah, karena aturan sekolah hanya untuk siswa, suatu contoh siswa tidak boleh datang terlambat, sedangkan guru boleh terlambat. Siswa dilarang merokok di lingkungan sekolah tetapi guru boleh merokok. Siswa wajib memakai seragam dengan atribut lengkap, tetapi guru tidak, siswa laki-laki dilarang rambut panjang dengan bentuk dan ukuran disesuaikan, tetapi aturan itu hanya untuk siswa.

Perilaku yang penulis uraikan di atas terjadi dalam dunia pendidikan sekarang ini, hal seperti ini akan merusak tatanan pendidikan, guru yang seharusnya sebagai sosok yang harus dicontoh oleh siswa tidak lagi dapat dijadikan contoh. Perilaku feodalisme ini bertentangan dengan semboyan yang dicanangkan oleh Kihajar Dewantara dengan tiga semboyan, “*Ingarso sung Tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani* (inews 2021)

Salah satu dari semboyan itu adalah "*ingarso sung tulodao*" arti dari semboyan itu adalah jika di depan menjadi teladan. Keteladanan merupakan metode pendidikan yang sangat ampuh untuk membentuk karakter siswa.

3. Ranking Rapor

Setiap kali penerimaan rapor banyak orang tua langsung memeriksa halaman akhir rapor. Memeriksa jumlah nilai dan ranking berapa. Saat mekanisme sekolah tidak memberikan ranking nilai orang tua buru-buru menanyakan perbandingan kelas dalam lembar nilai yang dimiliki guru. Orang tua lebih suka melihat ranking, entah berapapun nilainya. Asal sudah masuk 3 besar anak diberi selamat. Sedangkan bagi yang rankingnya terendah dimarah-marahi hingga anaknya malu dan pucat pasi.

Di sini orang tua lupa bahwa anak berprestasi tak hanya dinilai dari angka ranking dalam kelas maupun paralel satu tingkat. Tidak hanya dinilai dari prestasi kognitifnya saja. Bukankah setiap anak memiliki kecerdasan masing-masing. Orang tua lupa dengan pencapaian tertinggi anak untuk memberi selamat. Orang tua lupa dengan perjuangan anak ketika meraihnya. Tidak adil bukan, jika hanya menilai anak dari aspek kognitif saja. Bukan dari kemampuan lain yang dimiliki anak yang sebenarnya lebih melejit. (Wijaya:2021)

Dampak Negatif Ranking Rapor bagi anak

Ada beberapa dampak yang diterima oleh anak saat orang tua menuntut ranking terbaik anaknya.

1. Anak merasa dibanding-bandingkan
2. Anak tidak percaya diri
3. Anak terbebani tuntutan orang tua
4. Mencari pelampiasan di luar rumah
5. Kreatifitas menurun
6. Segala sesuatu dinilai secara materi

4. Sekolah Favorit

Pada dasarnya, status "sekolah favorit" adalah penilaian yang diberikan oleh masyarakat, bukan oleh pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak pernah membuat 'label' pembeda antara "sekolah favorit" dan "sekolah non favorit".

Adanya sekolah favorit ini bisa jadi kebijakan lokal yang diterapkan oleh pemangku kebijakan dalam pendidikan, karena salah dalam memahami tujuan didirikannya sekolah dan salah dalam memahami tujuan pendidikan.

Dampak negatif "Favoritisme Sekolah"

1. Siswa menempuh perjalanan jauh dan bahkan ada yang tinggal jauh dari orangtua.
2. Penekanan kompetisi pada siswa, eksklusif hanya bagi siswa dengan nilai UN tinggi.
3. Ketidakadilan bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.

4. Pelabelan anak bodoh atau pintar hanya berdasarkan nilai UN.
5. Ketidakadilan bagi siswa dengan nilai UN kurang.
6. Perhatian pemerintah pusat atau pemerintah daerah hanya kepada "sekolah favorit".
7. Guru kurang termotivasi untuk meningkatkan kompetensi diri.
8. Suburnya praktik jual beli kursi dan pungli. (Harusilo 2021)

C. Cara mengatasi feodalisme dalam pendidikan

Budaya feodalisme perlu untuk dihilangkan dalam system pendidikan di Indonesia, karena hal ini dapat merusak dan menurunkan mutu pendidikan kita kedepannya. System feodalisme ini merupakan warisan dari kolonial belanda ketika mejajah Indonesia. Di Negara Belanda sendiri paham ini sudah diubah, tetapi system ini masih diterapkan dalam system pendidikan kita, maka sudah saatnya system ini dihapus. Dalam tulisan ini penulis akan menguraikan bebearapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi feodalime pendidikan.

1. Muhammad Nur Rizal sebagai praktisi dan pengamat pendidikan mengatakan, bahwa untuk menghilangkan feodalisme pendidikan ini cukup dengan merubah *mindset* guru tidak perlu merubah kurikulum. (jpnn 2021) Guru perlu disadarkan bahwa system pendidikan feodalisme tidak lagi relefan dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka guru harus merubah cara berfikir dan bertindak dalam mengelolah pendidikan kedepan.

2. Konsep merdeka Belajar.

Menurut Nadiem Makarim kata "Merdeka Belajar" paling tepat digunakan sebagai filosofi perubahan dari metode pembelajaran yang terjadi selama ini. Sebab, dalam "Merdeka Belajar" terdapat kemandirian dan kemerdekaan bagi lingkungan pendidikan menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran. "Kenapa kami memilih "Merdeka Belajar" dari awal? Jawabannya ada dua, pertama filsafat Ki Hadjar Dewantara menginspirasi saya dan tim saya mengenai dua konsep, satu adalah kemerdekaan, kedua adalah kemandirian," kata Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X di DPR RI, Kamis (27/8/2020). "Dan ini dua konsep ini nyambung ya, ini dua konsep yang tidak bisa dipisahkan, kemandirian dan kemerdekaan, dan itu adalah esensi Ki Hadjar Dewantara yang menginspirasi kami di Kemendikbud terhadap apa perubahan yang dibutuhkan," ucap dia. Baca juga: Mengenai Hak Paten Merdeka Belajar, Ini Penjelasan Mendikbud Nadiem Menurut Nadiem, "Merdeka Belajar" dibutuhkan di era saat ini, anak-anak tidak lagi harus mengikuti kurikulum yang tersedia, namun bisa menggunakan metode belajar yang paling cocok digunakan. (Kompas 2021)

3. Hapus Ujian Nasional (UN)

MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memutuskan 2020 akan menjadi pelaksanaan Ujian Nasional di Indonesia. Penyelenggaraan UN selanjutnya akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Asesmen ini terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter. Tim Riset Media Indonesia mencoba menelusuri beberapa fakta atau dampak yang selama ini mengitari Ujian Nasional yang punya banyak nama tersebut. Pernah disebut Ujian Penghabisan, Ujian Negara, Ebtanas, Ujian Sekolah hingga sebutan Ujian Nasional seperti sekarang. Apa saja fakta-faktanya? Berikut beberapa temuan yang berhasil dirangkum Tim Riset Media Indonesia :

1. UN membuat para siswa, guru, dan sekolah hanya fokus pada nilai dan bukan kompetensi. Jikapun nilai anak tinggi dalam UN, itu bukan representasi kompetensi mereka. Sebabnya, bentuk soal pilihan ganda dalam UN hanya mengetes ranah kognitif level rendah, yaitu tahu, mengerti, dan hafal.
2. Dalam banyak penyelenggaraan UN, banyak saja kecurangan yang terjadi misalnya, kebocoran soal yang terjadi setiap tahun di berbagai daerah. Salah satu yang pernah terjadi misalnya kasus bocornya soal ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di SMPN 54 Surabaya tahun 2018 lalu.
3. Tampaknya juga UN membuat banyak orang tua menjadi cemas sehingga mendorong anak mengikuti bimbel agar lulus. Dalam pengakuan orang tua, banyaknya bimbel ini membuat anak merasa tertekan, juga mengganggu kesehatan anak-anak dan kualitas komunikasi mereka dengan orangtua.
4. Fakta lain lagi ialah pihak sekolah merasa tertekan jika ada banyak siswa yang tak lulus dari sekolah mereka. Akibatnya, banyak sekolah melakukan istigatsah. Bahkan, ada sekolah yang melakukan kecurangan dengan membocorkan soal agar seluruh siswa dapat lulus 100% dan mencapai nilai tinggi. Tentu saja ada dampak-dampak lain yang bisa diungkap. Yang pasti Mas Menteri Nadiem sudah punya pertimbangan cukup matang sehingga berani memutuskan UN yang punya banyak catatan tersebut akhirnya dihapus diganti dengan AKM. (Suwarta 2021)

4. PPDB (Penerimaan Peserta didik Baru) berbasis Zonasi

Sistem zonasi bertujuan untuk memberikan pemerataan pendidikan pada seluruh masyarakat hingga yang berada di *remote area*. Muhadjir Effendy seperti yang dikutip dari detik.com menegaskan, pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama. Maka, tidak boleh ada diskriminasi, hak eksklusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah. Sekolah negeri harus memproduksi layanan publik yang cirinya *non excludable*, *non rivalry*, dan *non discrimination*.

Diharapkan sistem ini bisa menghapuskan diskriminasi dan hak eksklusif, serta upaya perubahan cara pandang masyarakat mengenai sekolah 'unggulan'. Sebab, selama ini sekolah 'unggulan' kerap identik dengan siswa pintar dan berekonomi menengah ke atas.

Muhadjir Effendy pun menjelaskan bahwa sekolah, khususnya sekolah negeri harus mampu mendidik semua siswa tanpa ada perbedaan. Prestasi itu tidak diukur dari asal sekolah, melainkan dari masing-masing individu anak yang berhak menentukan prestasi dan masa

depannya. Setiap anak punya keistimewaan dan keunikannya masing-masing yang bisa dikembangkan secara maksimal untuk masa depannya.

Kesimpulan

Paham feodalisme merupakan warisan dari penjajahan kolonial Belanda dan Jepang di Indonesia, namun paham ini juga masuk dan berkembang dalam dunia pendidikan Indonesia padahal Belanda sendiri sudah meninggalkan paham Feodalisme.

Bentuk-bentuk feodalisme dalam pendidikan sangat banyak ragamnya seperti, siswa yang kritis dianggap sebagai pembangkangan, aturan hanya berlaku untuk siswa, sedangkan bagi guru tidak berlaku, adanya ranking rapor, berlakunya sekolah favorit yang menjadi imej negatif bagi masyarakat, serta masih banyak bentuk feodalisme lainnya.

Feodalisme pendidikan ini akan dapat dihapus dengan beberapa cara diantaranya, merubah mindset pendidik, terapkan konsep merdeka belajar, hapus ujian nasional, terapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDBP)

DAFTAR PUSTAKA

Freire, Paulo. *Politik Pendidikan : Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999)

Haryanto, 2012: dalam artikel “pengertian pendidikan menurut para ahli <http://belajarpsikologi.com/pengertianpendidikan-menurut-ahli/> diakses pada tanggal 9 april 2017

<https://angipermana.top/keterampilan-abad-21/>, diakses bulan Agustus 2021.

<https://kumparan.com/muh-karim/feodalisme-pendidikan-tinggi-1tw1NUw3W07/>

<https://medium.com/@rahmawatis381/guru-dalam-feodalisme-pendidikan-6e35f90703c5>

<https://www.inews.id/news/nasional/makna-lambang-tut-wuri-handayani-semboyan-ki-hajar-dewantara>. diakses bulan Agustus 2021.

<https://www.jpnn.com/news/pengamat-hentikan-feodalisme-sistem-pendidikan-di-indonesia>, diakses bulan Agustus 2021.

<https://www.neraca.co.id/article/34019/feodalisme-pendidikan-oleh-aries-musnandar-dosen-uin-malang>. diakses Agustus 2021.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)

Siti Salmi, https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5011-Full_Text.pdf, h. 28, diakses 2021.

Ummi Azzura Wijana. *Dampak Negatif Ranking Rapor*,
<https://www.kompasiana.com/sumiatun/5ac2e5e6dcad5b07665332d2/dampak-negatif-ranking-rapor-sekolah>. Diakses bulan Agustus 2021

Undang-undang RI no 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, (Bnadung: Citra Umbara, 2008)

Yohanes Enggar Harusilo, 8 Dampak Negatif Favoritisme Sekolah Menurut Kemendikbud, <https://edukasi.kompas.com/read/2019/01/29/18183601/8-dampak-negatif-favoritisme-sekolah-menurut-kemendikbud?page=all> diakses Bulan Agustus 2021

<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/27/16515301/ini-penjelasan-mendikbud-nadiem-soal-konsep-merdeka-belajar>. diakses bulan Agustus 2021